

KOMPAS	YUDHA	MERDEKA	POS KOTA	HALUAN	MUTIARA
PR. BAND	A. B.	BISNIS IN	WASPADA	PRIORITAS	
B. BUANA	PELITA	S. KARYA	S. PAGI	S. PEMBARUAN	

H A R I : Rabu

TGL. 15 JUL 1987

HAL.

NO.



**RIBUT** — Biennale VII Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dibuka Senin malam (13/7) oleh H.B. Jassin. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pameran ini diselingi ribut-ribut, kali ini mempertanyakan pola seleksi oleh DKJ.

## Biennale VII Dewan Kesenian Jakarta

# Dewan, Bukan Dewa ...

PAMERAN besar seni lukis Indonesia oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) yang disebut *biennale* dibuka Senin malam di Ruang Pameran Utama TIM. Biennale ke-7 yang diikuti oleh 26 pelukis dengan masing-masing menampilkan rata-rata dua karya ini akan berlangsung sampai 31 Juli 1987.

Dengan 26 pelukis di antara ratusan pelukis Indonesia, di sebuah forum yang memang diperuntukkan pelukis-pelukis terkemuka sekaligus untuk mengetahui peta bumi seni lukis Indonesia, forum ini barangkali memang bisa disebut "bergensi". Dan jangan lupa, selama ini tak ada forum lain kecuali yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta — yang lalu bak dewa menyabdakan siapa yang menghiasi peta bumi seni lukis Indonesia.

Maka selanjutnya, selain disorot, diinginkan banyak pelukis, forum ini juga dikritik, dicaci, dicurigai. Belum pernah *biennale* seni lukis yang diselenggarakan dua tahun sekali ini sepi dari musik pengantar ribut. Penyelenggaraan pertama kali tahun 1974 diwarnai peristiwa Desember Hitam dan munculnya Gerakan Seni Rupa Baru yang menggegerkan.

Begitulah terus-menerus, sampai ribut remeh-remeh seperti ketika di tahun 1984 pelukis Sudjojono (alm) menolak ikut karena keselamatan lukisan tidak diperhatikan. Ia menyimpulkan waktu itu, orang DKJ tak punya visi kesenimanan.

\* KALI ini, kasak-kusuk tentang ketidak-beresan penyelenggaraan pameran tersebut beredar lagi. Yang dipermasalahkan sekarang terutama pola seleksi tentang siapa pantas dan siapa tak pantas mengikuti *biennale*. Beberapa pelukis agaknya tersinggung dengan otoritas DKJ, yang tidak secara adil mengundang semua pelukis untuk ambil bagian dalam pameran. Tidak semua pelukis mendapat undangan. "Mestinya semua diundang. Ini lepas

mereka bakal mengirim lukisan untuk diseleksi atau tidak. Ini kan forum penting," kata Bagong Kusudiarjo yang selain penari memang juga pelukis.

Pada tahun-tahun sebelumnya, *biennale* memberi undangan pada hampir semua pelukis sebelum akhirnya diseleksi. Pameran dibagi dua kelompok, yaitu kelompok umur 40 tahun ke atas dan 40 tahun ke bawah atau pelukis muda. Selain itu juga diadakan pengamatan terhadap resensi-resensi di media massa mengenai kiprah pelukis-pelukis Indonesia.

Kini, menurut Komite Seni Rupa DKJ yaitu Arsono dan Sri Warso Wahono, pemilihan dilakukan berdasar *survey* yang dilakukan oleh empat orang. Selain Arsono dan Sri Warso, juga Mustika dan Sudarmadji. Menurut Sri Warso mereka mengadakan penelitian itu di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Yogya, Surabaya, Malang, Jember, Bali, Medan, Ujungpandang.

Persoalan dengan mekanisme pemilihan berdasar *survey* semacam ini ialah, seberapa jauh wilayah yang dicakup ini sah dimasukkan dalam peta seleksi pelukis Indonesia, sementara daerah yang lain tidak? "Wah, soal ini kami memang masih lemah sekali," kata Sri Warso Wahono.

Tapi rupanya, menurut Arsono dan Sri Warso Wahono, yang hendak dilakukan oleh DKJ terutama ialah pehyngkiran semacam mitos-mitos dalam dunia seni lukis Indonesia sekarang. Menurut pandangan DKJ, selama ini dunia seni lukis Indonesia dikuasai mitos bahwa seolah pelukis Indonesia hanyalah Affandi, Basuki Abdullah, Pirous, But Mochtar, Fajar Sidik, dan nama-nama besar lain.

Nah, inilah sebetulnya titik simpul di mana yang namanya otoritas berperan. Lebih-lebih selama ini tidak ada otoritas lain selain DKJ, yang tentu saja berkedudukan di Jakarta, tempat sebagian besar media massa berpengaruh bermarkas, termasuk pengamat

dan kritikus, penikmat, juga pembeli.

Bagaimanakah sebaiknya otoritas DKJ dilihat dalam konteks itu?

KARENA, tampaknya selalu aktual untuk mempertanyakan seberapa jauhkah forum resmi seperti ini mampu menjaga kehormatannya, agar keragaman dunia seni lukis Indonesia tak terpotong semata-mata oleh selera kebijaksanaan?

"Memang, seharusnya ada kesadaran, bahwa Dewan yang menentukan ini bukan dewa," kata Arsono. Maksudnya, Arsono ingin mengatakan, bahwa forum *biennale* ini bukan segala-galanya.

Justru inilah mitos yang harus dihancurkan itu? Bahwa DKJ bukan dewa, dan otoritas untuk menentukan mutu karya harus mencari acuan lebih luas. Sebab selama ini juga sering dipertanyakan, seberapa jauh kriteria-kriteria modern mampu menempatkan seni-seni rakyat yang jelas hidup di tengah masyarakat punya tempat juga dalam peta kesenian?

Sementara dalam kancah seni lukis modern ini sendiri, dalam kira-kira sepuluh tahun terakhir ini, juga telah terjadi pergeseran-pergeseran. Di Jakarta misalnya, muncul *gallery-gallery* baru yang aktif mengadakan pameran dan penjualan lukisan. Demikian juga pusat-pusat kebudayaan asing, Pasar Seni Ancol, atau Bentara Budaya, yang harus diakui makin menempatkan TIM dan DKJ dalam setting baru, yakni setting perubahan.

Kewibawaan otoritas justru hanya bisa dicapai lewat bukti berupa kemampuan melihat tanda-tanda perubahan ini, dan merumuskan gagasan baru yang mampu menyerap seluruh gejala perubahan.

DKJ barangkali memang bukan dewa. Atau dalam jaringan perubahan ini, dewa jangan-jangan memang tak dibutuhkan.

(dn)